

Dinamika Efektivitas *Green bond* dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Komparasi dengan Pendekatan Scoping Review

Istiqomah Nur Barokah
Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Keuangan Negara STAN
4131210030_istiqomah@pknstan.ac.id
Agus Bandiyono
Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Keuangan Negara STAN
agusbandiyono@pknstan.ac.id

Informasi Artikel

Tanggal Masuk:
January 28, 2025

Tanggal Revisi:
February 28, 2025

Tanggal Diterima:
3 May 2025

Publikasi Online:
05 Mei 2025

Abstract

The implementation of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles integrated into business practices and public policies is a strategic step in realizing the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs). However, this effort requires a lot of funding. To overcome these challenges, countries around the world have created innovative funding instruments specifically aimed at developing green projects, namely green bonds. The comparative study conducted used the scoping review method to assess the effectiveness of green bond issuance in various countries, identify challenges, and review various recommendations for the development of green bonds. The results of the study show that green bond issuance is still concentrated in certain sectors, such as energy and environmentally friendly building construction. Obstacles to green bond development vary from country to country, including aspects of issuance, regulation, and investor appeal. The articles referenced in this study comprehensively discuss the potential, benefits, challenges, and recommendations to maximize the role of green bonds as a sustainable funding solution.

Key Words: *green bond, green sukuk, scoping review, SDGs 2030*

Abstrak

Penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang diintegrasikan dalam praktik bisnis dan kebijakan publik merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030. Namun, upaya ini memerlukan pendanaan yang tidak sedikit. Untuk mengatasi tantangan tersebut, negara-negara di dunia menciptakan inovasi instrumen pendanaan yang khusus ditujukan untuk pembangunan proyek hijau, yaitu *green bond*. Studi komparasi yang dilakukan menggunakan metode scoping review untuk menilai efektivitas penerbitan *green bond* di berbagai negara, mengidentifikasi tantangan, serta meninjau berbagai rekomendasi untuk perkembangan *green bond*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan *green bond* masih terkonsentrasi pada sektor tertentu, seperti energi dan pembangunan gedung ramah lingkungan. Hambatan dalam pengembangan *green bond* bervariasi di setiap negara, mencakup aspek penerbitan, regulasi, dan daya tarik bagi investor. Artikel yang menjadi rujukan dalam penelitian ini membahas secara komprehensif potensi, manfaat, tantangan, dan rekomendasi untuk memaksimalkan peran *green bond* sebagai solusi pendanaan berkelanjutan.

Key Words: *green bond, green sukuk, scoping review, SDGs 2030*

PENDAHULUAN

Perubahan iklim telah menjadi ancaman global yang mendesak sehingga menuntut tindakan segera dari seluruh pemangku kepentingan. Kondisi ini tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga berdampak luas pada berbagai sektor, termasuk ekonomi, kesehatan, dan sosial. Salah satu pendekatan yang muncul sebagai jawaban atas tantangan ini adalah penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yang diintegrasikan dalam praktik bisnis dan kebijakan publik. ESG tidak hanya berfungsi sebagai

indikator tanggung jawab lingkungan dan sosial, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tujuan global seperti yang tercermin dalam Paris Agreement 2015.

Paris Agreement merupakan komitmen dari negara-negara di dunia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, peningkatan penggunaan energi terbarukan, dan pendanaan proyek-proyek ramah lingkungan. Akan tetapi, pada tingkat global, dukungan dari negara-negara maju dalam pendanaan mitigasi perubahan iklim semakin melemah. Padahal, negara berkembang seperti Indonesia sangat bergantung pada bantuan finansial dan teknologi dari negara-negara maju. Indonesia membutuhkan dana sebesar Rp4.002,4 triliun untuk mencapai target *net zero emission* pada tahun 2060. Namun, hingga saat ini anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah dalam menangani perubahan iklim hanya sekitar Rp81,4 triliun per tahun.

Menurut *International Renewable Energy Agency*, hingga tahun 2035, diperlukan USD 55 triliun untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan. Sebagai bagian dari upaya global dalam mengatasi masalah tersebut, berbagai negara, termasuk Indonesia, telah mengembangkan inovasi pada sektor keuangan guna mendukung transisi menuju pembangunan yang lebih ramah lingkungan. Salah satu instrument keuangan yang dikembangkan dalam memitigasi dampak perubahan iklim adalah *Green bond*. *Green bond* merupakan instrument utang yang hasil penerbitannya sebagian atau seluruhnya digunakan secara eksklusif untuk membiayai proyek-proyek hijau yang memenuhi syarat eligible green proyek. Perbedaan yang mendasar dari *green bond* dan obligasi konvensional terletak pada kewajiban pemenuhan standar *Green Bond Principle* (GBP).

Selain mampu menjawab kebutuhan akan inovasi keuangan, *green bond* dapat menjadi instrument dalam mewujudkan pencapaian SDGs 2030 melalui pembiayaan program-program berkelanjutan yang bermanfaat bagi lingkungan di masa depan (Budiarso, 2019). Hingga saat ini, penerbitan *green bond* mengalami perkembangan yang cukup pesat. Berdasarkan *Green bond Market Summary* tahun 2024, jumlah penerbitan *Green, Social, Sustainability, and Sustainability-linked (GSSS) Bond* di pasar telah mencapai USD 5,7 triliun. Pada kuartal kedua 2024, *green bond* masih mendominasi pasar GSSS Bond dengan menyumbang 60% dari total penerbitan. Investor dari *green bond* mencakup berbagai jenis kalangan, baik investor umum maupun investor spesialis, seperti Perusahaan yang berorientasi pada ekonomi hijau di Eropa dan Amerika Serikat (World Bank, 2015).

Adopsi *green bond* diberbagai negara terus menunjukkan perkembangan signifikan seiring dengan semakin tingginya kesadaran akan pentingnya investasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2019, China, Jerman, Amerika Serikat, Prancis, dan Belanda mewakili 50% dari jumlah penerbitan *green bond* di dunia, dengan kontribusi masing-masing berkisar antara USD22 miliar hingga USD 27 miliar (Melau & Hoffmann, 2020). Proyek-proyek yang didanai dengan *green bond* bervariasi tergantung pada kebijakan negara penerbit. Penelitian dari Azhgaliyeva & Kapsalyamova (2021) menyatakan penerbitan *green bond* di Asia Tenggara sebagian besar dialokasikan untuk proyek-proyek green buildings (43%) dan energi terbarukan (32%). Sementara itu, alokasi dana *green bond* di dunia lebih berfokus pada energi, transportasi, dan green building.

Meskipun menunjukkan tren positif, penerbitan *green bond* ini masih jauh dibandingkan dengan obligasi konvensional. Hal ini disebabkan karena penerbitan *green bond* mengalami berbagai tantangan di masing-masing negara. Di Eropa, hambatan utama terletak pada ketiadaan insentif fiskal dan tingginya biaya penerbitan, yang menghambat perkembangan *green bond* (Gianfrate & Peri, 2019). Di Mesir, Aly (2024) mengungkapkan bahwa tantangan utama adalah regulasi yang belum memadai, seperti kurangnya pedoman yang jelas dan kompleksitas dalam pencatatan pendapatan dari hasil *green bond*. Sementara itu, di Indonesia dan Malaysia, penerbitan *green bond* berbasis syariat Islam (*green sukuk*) masih menghadapi masalah serius terkait greenwashing (Liu & Lai, 2021). Pendanaan proyek dengan teknologi baru yang belum teruji melalui *green sukuk* juga menimbulkan keraguan terhadap efektivitasnya dalam mendukung pencapaian SDGs 2030 (Putra et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas pendanaan *green bond* dalam mendanai proyek berkelanjutan di berbagai negara, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerbitannya, serta meninjau rekomendasi untuk pengembangan *green bond* di masa depan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung fokus pada analisis manfaat *green bond* secara teoritis atau penerapannya dalam satu wilayah tertentu, penelitian ini menawarkan pendekatan komparatif lintas negara untuk mengeksplorasi keragaman praktik penggunaan dan tantangan dalam penerbitan *green bond*. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai penerapan dan tantangan pengembangan pendanaan berbasis *green bond* di berbagai negara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus rekomendasi bagi pemerintah dan sektor swasta, sehingga penerbitan *green bond* dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendanai proyek-proyek hijau dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030.

TINJAUAN PUSTAKA / KAJIAN TEORITIS

Teori Triple Bottom Line

Triple Bottom Line Theory merupakan konsep keberlanjutan yang mengintegrasikan tiga aspek utama, yaitu sosial (*people*), lingkungan (*planet*), dan ekonomi (*profit*). Konsep ini diperkenalkan oleh Elkington (1997) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Savitz & Weber (2006) (Žak, 2015). Pilar sosial (*people*) berfokus pada dampak sosial bisnis terhadap berbagai pihak, yang mencakup aspek hak asasi manusia, kondisi kerja yang layak, dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Pilar lingkungan (*planet*) mengutamakan aspek tanggung jawab Perusahaan terhadap lingkungan. Sementara itu, pilar ekonomi (*profit*) menekankan pentingnya keuntungan (laba) sebagai tujuan utama bisnis. Keuntungan finansial yang stabil memungkinkan perusahaan untuk tetap beroperasi secara berkelanjutan (Nurhidayat et al., 2020). Melalui adopsi konsep *Triple Bottom Line*, perusahaan dapat mengelola operasionalnya secara lebih berkelanjutan, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat (Pandini et al., 2023).

Gambar 1. Konsep Triple Bottom Line



Sumber : Zak (2015)

Triple Bottom Line menyoroti pentingnya mencapai keseimbangan antara ketiga elemen keberlanjutan tersebut. Idealnya, semua keputusan bisnis harus berada di persimpangan ketiga elemen, di mana semua tujuan (sosial, lingkungan, ekonomi) terpenuhi. Namun dalam praktiknya sering terjadi kontradiksi atau ketegangan antara ketiga aspek tersebut. Misalnya, beberapa keputusan mungkin mengorbankan aspek lingkungan untuk keuntungan

ekonomi jangka pendek, sehingga dibutuhkan pemikiran sistemik dalam pengambilan keputusan (Hammer & Pivo, 2017).

Environmental, Social, and Governance (ESG)

Environmental, Social, and Governance merupakan sekumpulan standar evaluasi terhadap operasi Perusahaan yang mencakup tiga kriteria utama untuk mengukur keberlanjutan dan dampak suatu investasi terhadap Perusahaan (Cho et al., 2021). Praktik ESG mulai diterapkan sejak tahun 1970, ketika para investor mulai menunjukkan perhatian terhadap pelaporan praktik sosial dan lingkungan yang diterapkan oleh perusahaan (Richardson, 2009). Selanjutnya, pada tahun 2006, PBB menetapkan bahwa investasi yang bertanggung jawab menjadi salah satu aspek penting dalam pengambilan keputusan terkait kerja sama Perusahaan.

Praktik ESG melibatkan tiga aspek utama yang menjadi indikator penting dalam manajemen risiko, kinerja finansial dan non-finansial, serta kompetensi manajerial Perusahaan (Galbreath, 2013). Lingkungan (*Environmental*) berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang efisien dan bertanggung jawab, seperti pengelolaan energi, air, perlindungan sumber daya alam, dan pengurangan emisi karbon. Sosial (*Social*) mencakup tanggung jawab terhadap hak asasi manusia, prinsip bisnis yang adil, keamanan produk, dan kesetaraan gender. Sementara itu, Tata Kelola (*Governance*) berfokus pada masalah internal perusahaan, seperti kepemimpinan, pengendalian perusahaan, dan perlindungan hak-hak pemegang saham. Tata kelola yang baik mencakup transparansi dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas dalam pelaporan finansial, serta pengelolaan yang adil dan etis terhadap semua pemangku kepentingan (Zahid et al., 2022).

Green bond

Green bond merupakan jenis obligasi yang hasilnya digunakan secara eksklusif untuk membiayai sebagian atau seluruhnya proyek-proyek ramah lingkungan. Proyek yang dibiayai dapat berupa proyek baru maupun proyek yang sudah ada selama memenuhi empat prinsip utama yaitu *Green bond Principle (GBP)* (ICMA, 2021). *Green bond* berbeda dari obligasi biasa karena memiliki label "hijau" yang diberikan oleh penerbit obligasi. Label ini merupakan bentuk komitmen dari penerbit untuk menggunakan dana pada proyek hijau yang memenuhi *Climate Bond Initiative (CBI)* (Kaminker, 2015). Climate Bond Initiative merupakan organisasi non profit yang berfokus pada investasi dengan menetapkan spesifikasi proyek dan aset yang didanai *green bond* sesuai dengan Paris Agreement.

Selain *green bond*, *green sukuk* adalah bentuk inovasi lain dalam pendanaan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. *Green sukuk* merupakan instrument pendanaan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk melindungi lingkungan dari dampak buruk perubahan iklim (Alam et al., 2023). *Green sukuk* digunakan untuk memfasilitasi upaya penurunan emisi karbon dan mencapai netralitas karbon. Pengumpulan dana dari *green sukuk* ini berfokus pada pengelolaan limbah, energi terbarukan, transportasi, bangunan hijau, dan pengelolaan air (Kaminker & Youngman, 2015).

Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals (SDGs) diluncurkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai inisiatif global untuk memberantas kemiskinan, melindungi lingkungan, serta mempromosikan perdamaian dan kemakmuran bagi semua orang pada tahun 2030 (Odey et al., 2021). Agenda ini terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang dirancang untuk menangani tantangan mendesak yang dihadapi komunitas global. SDGs hadir untuk melengkapi dan memperluas ambisi yang ada pada MDGs dengan mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan dan sosial yang lebih mendalam. Selain itu, SDGs memiliki pendekatan yang lebih inklusif dengan melibatkan seluruh negara, baik negara maju maupun negara berkembang.



Gambar 2. Tujuh Belas Komponen SDGs

Sumber : <https://sdgs.bappenas.go.id/>

SDGs membutuhkan pendanaan sebagai kunci keberhasilan dari implementasi pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati dalam Addis Ababa Action Agenda (AAAA). Salah satu strategi utama yang disepakati dalam konferensi ini adalah implementasi blended financing, yaitu kolaborasi pendanaan antara pemerintah dan sektor swasta yang memungkinkan pembagian risiko dan manfaat secara adil. Meskipun strategi ini telah diterapkan, masih terdapat kesenjangan pembiayaan yang cukup signifikan dalam mewujudkan SDGs di negara berkembang. Kesenjangan pembiayaan ini menciptakan tantangan besar dalam memastikan bahwa SDGs dapat tercapai tepat waktu, terutama untuk negara-negara yang memiliki keterbatasan sumber daya finansial. Sebesar USD2-3 triliun per tahun untuk program SDGs harus ditutup melalui skema pembiayaan inovatif (Alfirman et al., 2020). Skema pendanaan ini tidak hanya menyediakan dana yang dibutuhkan untuk proyek-proyek pembangunan berkelanjutan tetapi juga memberikan insentif bagi investor swasta untuk berpartisipasi dalam mendanai proyek yang berdampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode *scoping review*. *Scoping review* merupakan jenis penelitian yang berguna untuk menentukan sejauh mana suatu topik atau bidang telah diteliti (Pham et al., 2014). Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran umum tentang jumlah, jenis, dan cakupan bukti yang tersedia dalam literatur yang relevan dengan suatu masalah penelitian (Munn et al., 2018). *Scoping review* memungkinkan peneliti untuk memetakan dan mengeksplorasi berbagai aspek dari suatu topik tanpa terbatas pada pertanyaan penelitian yang terlalu spesifik. Proses *scoping review* melibatkan langkah-langkah sistematis, seperti identifikasi pertanyaan penelitian yang ingin dijawab, pemilihan literatur yang relevan, ekstraksi data dari sumber-sumber yang dipilih, serta sintesis dan analisis data untuk menyimpulkan temuan utama (Nurhamasyah et al., 2018).

Peneliti menggunakan data sekunder yang berisi berbagai informasi terkait penerbitan *green bond* di dunia yang diambil dari beberapa sumber literatur yang dapat diakses secara publik, seperti jurnal, kajian pemerintah (<https://www.djppr.kemenkeu.go.id>), dan website resmi bank dunia (<https://treasury.worldbank.org>). Peneliti memanfaatkan website *Google Scholar* untuk mencari jurnal-jurnal yang relevan dengan topik penelitian, serta menggunakan fitur pencarian yang tersedia untuk memperoleh literatur yang paling sesuai dengan fokus penelitian. Kata kunci yang digunakan yaitu "*green bond*" dan "*green sukuk*" dengan batasan tahun 2018 hingga 2024 untuk memastikan bahwa literatur yang dipilih merupakan informasi terkini dan relevan. Pemilihan periode waktu ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang perkembangan dan tren terbaru dalam penerbitan *green bond* dan *green sukuk* secara global. Peneliti juga membuat pedoman untuk mempermudah proses *scoping review*.

Tabel 1. Pedoman Penelitian

Ruang Lingkup	Sumber Data	Informasi yang Digunakan
Bahasa: Indonesia dan Inggris Lokasi Penelitian: Indonesia dan negara-negara yang dipilih penulis	Database elektronik: <i>google scholar</i>	Judul Nama Jurnal Nama Penulis Tahun Publikasi Penerbit Metode Penelitian Hasil Penelitian

Sumber: Diolah Penulis

HASIL DAN PEMBAHASAN

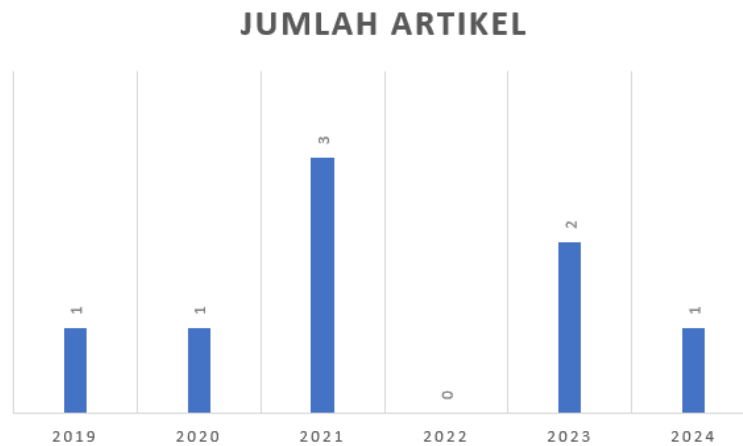
Penulis melaksanakan proses pengumpulan artikel ilmiah dengan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan guna memastikan literatur yang dipilih relevan dengan tujuan penelitian. Google Scholar digunakan sebagai sumber utama dalam pencarian literatur, karena menyediakan akses luas terhadap berbagai publikasi ilmiah. Penulis menerapkan strategi pencarian yang sistematis dengan menggunakan kata kunci seperti “*green bond*” dan “*green sukuk*” untuk menjaring artikel yang relevan. Selain itu, filter tahun publikasi dibatasi pada rentang waktu 2019 hingga 2024 untuk memastikan bahwa literatur yang diambil mencerminkan perkembangan terkini dalam bidang tersebut. Melalui proses ini, penulis berhasil mengidentifikasi delapan literatur yang memenuhi kriteria sebagai objek scoping review. Setiap artikel yang dipilih dievaluasi berdasarkan relevansi, kualitas metodologi, serta kontribusinya terhadap pemahaman mengenai penerbitan *green bond* dan *green sukuk*. Semua literatur yang teridentifikasi kemudian dirangkum secara sistematis dan disajikan dalam Tabel 2 untuk mempermudah pembaca memahami kerangka referensi penelitian ini

Tabel 2. Kerangka Referensi Penelitian

No	Judul Artikel	Judul Jurnal	Tahun Terbit
1.	Policy Support in Promoting <i>Green bond</i> in Asia	<i>ADB Working Paper Series</i>	2021
2.	Corporate <i>Green bond</i> Market Bond in Egypt : Barriers to Market Development	<i>Master's Thesis, the American University in Cairo</i>	2024
3.	The Green Advantage: Exploring the Convenience of Issuing <i>Green bonds</i>	<i>Journal of Cleaner Production</i>	2019
4.	<i>Green bonds</i> Driving Sustainable Transition in Asian Economies: The Case of India	<i>Journal of Asian Finance</i>	2021
5.	Identifying Factors Affecting The Preference for <i>Green bonds</i> : A Japanese Case Study	<i>Journal of Climate Finance</i>	2023
6.	The Emergence of <i>Green bonds</i> as an Integral Component of Climate Finance in South Africa	<i>South Africa Journal of Science</i>	2020
7.	Ecologies of green finance: <i>Green sukuk</i> and development of green Islamic finance in Malaysia	<i>Economy and Space</i>	2021
8.	The Role of <i>Green sukuk</i> for Sustainable National Development	Jurnal Ekonomi Syariah	2023

Sumber: Diolah Penulis

Sebagian besar literatur yang digunakan dalam penelitian ini terbit pada tahun 2021, dengan jumlah artikel sebanyak tiga buah. Artikel-artikel dari tahun 2023 ada dua buah, sementara masing-masing tahun 2019, 2020, dan 2024 hanya terdapat satu artikel. Tidak ada artikel yang diterbitkan pada tahun 2022, kemungkinan karena tidak ada publikasi yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh penulis dalam penelitian ini. Informasi lebih lanjut mengenai sebaran tahun penerbitan artikel dapat dilihat pada Gambar 3, yang menyajikan distribusi tersebut dengan jelas.



Gambar 3. Jumlah Artikel

Sumber: Diolah Penulis

Tabel 3 menunjukkan bahwa satu artikel diterbitkan oleh masing-masing ADB Institute, Emerald, SAGE, American University in Cairo, dan UIN Syarif Hidayatullah. Sementara itu, ada dua artikel yang diterbitkan oleh Elsevier. Sebaran penerbit ini mencerminkan keberagaman sumber yang digunakan, menunjukkan bahwa penelitian ini mengandalkan berbagai penerbit terkemuka di bidangnya untuk memastikan kualitas dan relevansi literatur yang digunakan.

Tabel 3. Penerbit

Penerbit	Jumlah
Elsevier	2
ADB Institute	1
<i>Emerald Group Publishing</i>	1
<i>SAGE Publications</i>	1
<i>American University in Cairo</i>	1
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	1
<i>Royal Society of South Africa (RSSA)</i>	1

Sumber: Diolah Penulis

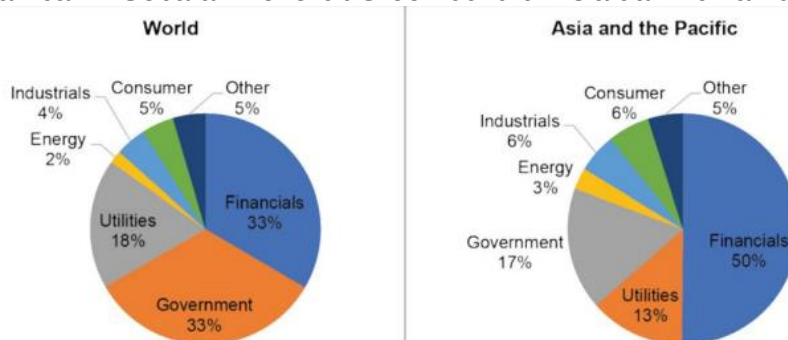
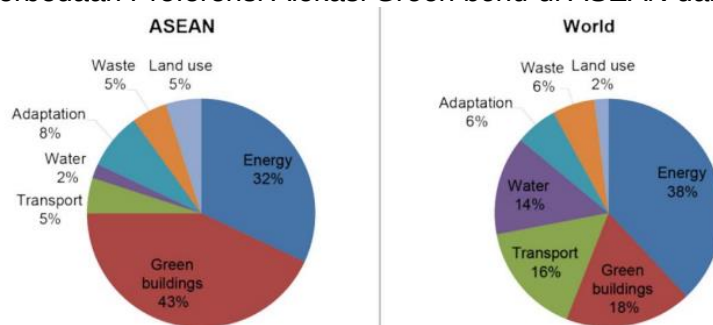
Aspek selanjutnya yang dibahas adalah sistematika penulisan. Tabel menunjukkan bahwa sistematika penyusunan dari masing-masing artikel yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar literatur yang dianalisis mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif, dengan total tujuh artikel. Hanya satu artikel yang menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif.

Tabel 4. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan	Jumlah
Kualitatif	7
Kuantitatif	1

Sumber: Diolah Penulis

Untuk tahap selanjutnya, penulis menganalisis setiap literatur secara deskriptif untuk memberikan rangkuman singkat tentang isi literatur yang membahas topik terkait *green bond* dan *green sukuk*. Literatur-literatur ini diterbitkan dalam rentang waktu enam tahun terakhir yang mencerminkan tren terkini dalam penelitian keuangan berkelanjutan, khususnya di bidang instrumen investasi hijau seperti *green bond* dan *green sukuk*. Penelitian yang dilakukan oleh Azhgaliyeva & Kapsalyamova (2021) menyatakan bahwa dengan wilayah yang sangat luas dan populasi yang terus berkembang, Asia memiliki potensi besar dalam mempercepat ekonomi berkelanjutan melalui penerbitan *green bond*. Beberapa negara di Asia yang memiliki potensi besar dalam penerbitan *green bond*, seperti China, Jepang, Republik Korea, dan India. Meskipun terdapat potensi yang besar, penerbitan *green bond* di Asia masih memiliki pangsa pasar yang kecil, yaitu sebesar 1,45% dari total penerbitan obligasi di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada banyak ruang untuk merealisasikan potensi *green bond* di Kawasan Asia. Lembaga keuangan memegang porsi terbesar sebagai penerbit *green bond* di Asia dengan porsi mencapai 50%, diikuti oleh pemerintah (17%), dan sektor utilitas (3%). Hal ini berbeda dengan penerbitan *green bond* secara global yang didominasi secara seimbang oleh pemerintah dan lembaga keuangan. Alokasi dana dari penerbitan *green bond* di Asia Tenggara masih kurang terdiversifikasi. Di kawasan ASEAN, sebagian besar negara cenderung mengalokasikan dana *green bond* untuk proyek-proyek yang terkait dengan bangunan hijau (43%) dan energi (32%), sehingga mengurangi keberagaman penggunaan dana untuk sektor-sektor lain yang juga penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, alokasi penggunaan dana *green bond* di dunia lebih mencerminkan diversifikasi, di mana transportasi dan pengelolaan air memegang porsi cukup besar, meskipun masih didominasi oleh sektor energi.

Gambar 4. Sebaran Penerbit *Green bond* di Asia dan Dunia 2018-2020Gambar 5. Perbedaan Preferensi Alokasi *Green bond* di ASEAN dan Dunia 2018-2020

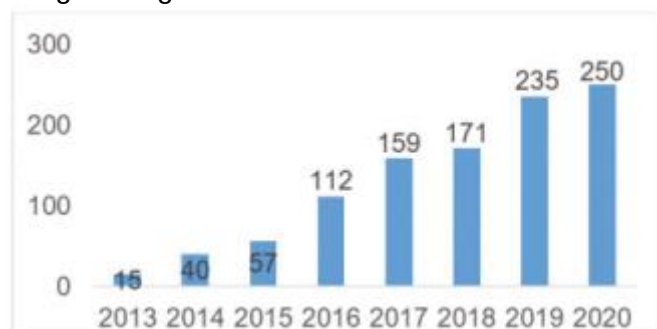
Sumber: Azhgaliyeva & Kapsalyamova (2021)

Bukti empiris dari penelitian Azhgaliyeva & Kapsalyamova (2021), menunjukkan bahwa hibah, insentif pajak, dan kebijakan di tingkat global, regional, dan nasional memiliki dampak positif terhadap penerbitan *green bond* di Asia. Penelitian ini juga menyoroti kemungkinan adanya persaingan antara penerbitan obligasi konvensional dan *green bond* sehingga

penerbitan obligasi konvensional dapat mengurangi minat terhadap *green bond*. Dana yang terkumpul dari penerbitan *green bond* sering kali lebih kecil dibandingkan dengan obligasi konvensional. Rata-rata *green bond* yang diterbitkan oleh negara-negara di Asia adalah sekitar \$0,03 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata obligasi konvensional yang mencapai \$1,20 miliar. Pemerintah harus berfokus pada kebijakan yang mendukung penerbitan *green bond*, seperti hibah dan insentif pajak. Selain itu, pemerintah juga harus mendorong sektor-sektor yang kurang berpengalaman dalam menerbitkan *green bond*, seperti sektor energi terbarukan supaya mempercepat pendanaan proyek-proyek berkelanjutan. Ngwenya & Simatele (2020) mengulas kebijakan *green bond* di Kawasan Afrika Selatan. Penerbitan *green bond* di Afrika Selatan diinisiasi oleh Nedbank di tahun 2012 yang menandai langkah penting dalam upaya negara tersebut untuk mendanai proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan perubahan iklim. Nedbank menerbitkan USD490 juta dalam bentuk *green bond* ritel dengan struktur yang mirip saving bonds. Hal ini memungkinkan investor untuk membeli obligasi dengan harga terjangkau dan jangka waktu fleksibel, yaitu antara 18 bulan hingga lima tahun. *Green bond* yang diterbitkan di Afrika Selatan digunakan untuk mendanai proyek-proyek energi terbarukan, seperti proyek pembangkit listrik tenaga angin dan matahari, serta kendaraan dengan emisi rendah. Contoh nyata dari pendanaan proyek melalui *green bond* di Afrika Selatan dilakukan oleh Pemerintah Kota Johannesburg dan Kota Cape Town yang mengeluarkan *green bonds* untuk mendanai proyek-proyek hijau mereka. *Green bonds* menunjukkan potensi besar untuk menjadi bagian penting dari pembiayaan perubahan iklim di Afrika Selatan. Potensi ini dapat berkembang apabila terdapat dukungan dari lembaga yang kuat, perencanaan yang baik, dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Gianfrate & Peri (2019), meninjau manfaat *green bond* dari sisi penerbit. Penelitian ini menggunakan *propensity score matching* untuk membandingkan perbedaan pengembalian antara *green bond* dan obligasi konvensional pada saat penerbitan. Penelitian ini melibatkan 3055 bond yang diterbitkan di Eropa dari tahun 2007 hingga 2017. Dari 3055 bond, 121 diantaranya merupakan *green bond*, dengan rincian 43 diterbitkan oleh korporat dan 78 diterbitkan oleh non korporat. Gianfrate & Peri (2019) mengungkapkan, *green bond* memberikan keuntungan finansial yang lebih besar bagi penerbit dibandingkan dengan obligasi konvensional. Meskipun memerlukan biaya tambahan untuk memperoleh sertifikasi hijau (*greenness assessment*) yang berisi penilaian untuk memastikan dana yang dihimpun digunakan dalam mendanai proyek yang memenuhi kriteria lingkungan, tetapi *green bond* lebih menguntungkan karena penghematan bunga yang lebih besar daripada biaya sertifikasi tersebut. Rata-rata penghematan bunga tahunan sebesar 0,18% dari nilai obligasi. Seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap investasi ramah lingkungan, penelitian ini juga menyoroti pentingnya kebijakan yang mendukung pasar *green bond* di Eropa, misalnya kebijakan pajak atau pengurangan biaya transaksi untuk mendukung transisi menuju ekonomi berkelanjutan. Berbeda dari penelitian Gianfrate & Peri (2019) penelitian dari Aruga & Bolt (2023) meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investor dalam memilih *green bond* sebagai instrument investasi di Jepang. Faktor-faktor ini didasarkan pada pedoman *Green bond Principle* (GBP) yang disusun oleh International Capital Market Association (ICMA) dan *Climate Bond Standard* (CBS) yang disusun oleh Climate Bonds Initiative (CBI). Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investor dalam memilih *green bond*, yaitu peringkat kredit, jenis penerbit, sertifikasi pihak ketiga, pelaporan, jenis proyek, dan tingkat suku bunga. Peringkat kredit mempengaruhi keputusan investasi karena investor cenderung memilih *green bond* yang memiliki peringkat lebih tinggi. Jenis penerbit bond mengklasifikasikan penerbitan bond berasal dari pemerintah daerah atau Perusahaan swasta. Penerbit yang berasal pemerintah daerah lebih disukai daripada penerbit dari perusahaan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh kecenderungan investor untuk memilih instrumen dengan risiko keuangan yang lebih rendah dan risiko *greenwashing* yang lebih kecil. Lebih lanjut, sertifikasi pihak ketiga yang mengonfirmasi kesesuaian dengan pedoman internasional juga berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Keberadaan

laporan yang jelas tentang bagaimana dana digunakan juga berpengaruh positif. Investor lebih memilih *green bond* yang menyediakan laporan transparan mengenai alokasi dana untuk proyek-proyek berkelanjutan. Tingkat suku bunga berperan penting dalam menentukan preferensi investor. Semakin tinggi bunga, semakin besar kemungkinan *green bond* dipilih. Meskipun bertujuan keberlanjutan, imbal hasil tetap menjadi faktor utama bagi investor dalam memilih investasi yang sesuai. Sementara itu, pilihan jenis proyek tidak mempengaruhi keputusan investasi atas *green bond*. Investor cenderung memilih investasi berdasarkan atribut lain, seperti kredibilitas penerbit dan imbal hasil. Aly (2024) melakukan studi literatur untuk memberikan analisis komprehensif tentang pasar *green bond* di Mesir dan mengidentifikasi berbagai hambatan dalam penerbitan *green bond* di Mesir. Sejak *green bond* diperkenalkan di pasar global, negara-negara di dunia mulai menerbitkan obligasi ini untuk mendanai upaya mereka menuju ekonomi berkelanjutan. Namun, tingkat penerbitan *green bond* di Mesir berada pada level sedang jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Bahkan saat ini, Mesir hanya menerbitkan satu *green bond* dari Perusahaan. Pada September 2020, Mesir menjadi negara pertama di Afrika Utara yang menerbitkan *green bond*. *Green bond* ini awalnya senilai USD 500 juta, tetapi karena permintaan tinggi, jumlahnya dinaikkan menjadi USD 750 juta dengan bunga 5,25%. Rendahnya penerbitan *green bond* di Mesir dipengaruhi oleh beberapa tantangan, meliputi tantangan umum dan tantangan spesifik. Tantangan umum meliputi kurangnya kesadaran pasar, rendahnya keterlibatan investor ritel, proses penerbitan *green bond* yang panjang dan rumit, harga dan biaya penerbitan, serta situasi ekonomi. Sementara itu, terdapat tantangan spesifik yang timbul akibat adanya persyaratan tambahan, seperti ketidaksiapan penerbit, ketiadaan pedoman yang jelas, biaya verifikasi dan pelaporan, kurangnya insentif bagi penerbit, dan kerumitan pencatatan pendapatan dari *green bond* yang harus dipisahkan dengan pendapatan lain. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan kolaborasi dari regulator, investor, dan lembaga keuangan di Mesir. Peneliti juga merekomendasikan beberapa kebijakan untuk meningkatkan penerbitan *green bond* di Mesir, yaitu peningkatan kapasitas pasar melalui program pelatihan, penyederhanaan proses penerbitan *green bond*, pembangunan infrastruktur pasar untuk menyediakan verifikasi dan sertifikasi dalam penerbitan *green bond*, dan pemberian insentif fiskal, seperti potongan pajak atau subsidi untuk menarik minat investor terhadap *green bond*.

Penelitian Prakash & Sethi (2021) menggunakan pendekatan analisis data sekunder untuk mengevaluasi kebijakan yang ada dalam mewujudkan proyek hijau, tantangan pembiayaan proyek hijau, dan urgensi penerbitan *green bond* untuk pendanaan proyek hijau. India menghadapi kesenjangan pembiayaan yang signifikan untuk proyek hijau akibat ketergantungan tinggi pada pinjaman bank yang berbiaya tinggi, keterbatasan akses terhadap pendanaan murah, dan minimnya partisipasi sektor swasta. *Green bond* menjadi solusi pembiayaan dalam mencapai target. Sejak diperkenalkan di tahun 2013, pasar *green bond* di India mulai menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain.



Gambar 6. Jumlah Penerbitan *Green sukuk* di India 2013-2020

Sumber: Prakash & Sethi (2021)

Hingga saat ini, penerbitan *green bond* di India terbatas pada entitas publik, seperti Power Finance Corporation dan Indian Railway Finance Corporation. Meskipun *green bond* menarik minat investor global, tetapi kurangnya pedoman penerbitan yang terstandarisasi, biaya penerbitan yang tinggi, serta kurangnya kesadaran di antara para pemangku kepentingan domestik menghambat perkembangan pasar domestik *green bond* di India. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah perlu membuat panduan yang jelas untuk menentukan proyek mana yang memenuhi syarat untuk didanai dengan *green bond*, membuat standar industri yang jelas terkait pelaporan dan penerbitan *green bond*, meluncurkan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait *green bond*, dan memberikan insentif pajak bagi penerbit dan investor *green bond*. Hasil pembiayaan melalui *green bond* di India difokuskan untuk mendukung manufaktur kendaraan listrik dan transportasi rendah karbon serta restorasi ekosistem air dan proyek mitigasi bencana. Selain *green bond*, *green sukuk* merupakan salah satu bentuk inovasi lain dalam mendanai proyek-proyek ramah lingkungan. Menurut data dari World Bank (2018), *green sukuk* berpotensi menghasilkan pendanaan senilai USD 2 triliun. Indonesia dan Malaysia menjadi negara yang pernah menerbitkan *green sukuk*. Di mana, penerbitan *green sukuk* di Malaysia dilakukan oleh korporasi domestik, sedangkan di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Selama dua decade terakhir, terdapat peningkatan signifikan dalam investasi berbasis keuangan Islam yang bertanggung jawab secara sosial (Social Responsibility Index) (Tahiri Jouti, 2019). *Green sukuk* tidak hanya menawarkan keuntungan ekonomi dan finansial, tetapi juga memfasilitasi mobilisasi sumber daya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di negara-negara berkembang (Prakash & Sethi, 2022). Penerbitan *Green sukuk* dari tahun ke tahun mengalami tren positif. *Green sukuk* sebagai instrument investasi untuk pembangunan berkelanjutan, telah semakin populer sebagai bagian dari strategi investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan (Wahab & Mohamed Naim, 2020).

Liu & Lai (2021) melakukan studi kualitatif interpretative dengan menekankan pada pendekatan financial ecologies untuk mempelajari bagaimana *green bond* dapat mengatasi berbagai keterbatasan dalam proyek hijau. Malaysia telah menunjukkan komitmennya terhadap *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan berupaya menjadi pusat keuangan yang berkelanjutan di dunia. Pemerintah Malaysia melalui *Securities Commission* meresmikan kerangka acuan penerbitan *green sukuk* dengan nama *Sustainable and Responsible Investment (SRI) Sukuk Framework* yang bertujuan memfasilitasi penerbitan sukuk untuk proyek-proyek yang berkelanjutan.



Gambar 7. *Sustainable and Responsible Investment (SRI) Sukuk Framework*
Sumber : Liu & Lai (2021)

Penerbitan *green sukuk* pertama kali dilakukan oleh Tadau Energy Sdn Bhd pada Juli 2017 di Malaysia, dengan dana yang terkumpul sebesar USD 58 juta untuk mendanai proyek tenaga surya di Sabah. Penerbitan ini memperoleh opini eksternal dari CICERO. *Green sukuk* yang diterbitkan di Malaysia lebih mengikuti prinsip *Green bond Principles* (GBP) daripada prinsip-prinsip Islam seperti yang diinginkan oleh para ulama keuangan di Malaysia. Meskipun *green sukuk* telah berhasil mencapai beberapa tujuan strategis Malaysia, seperti memperluas pasar sukuk domestik dan meningkatkan reputasi negara sebagai pusat keuangan Islam yang inovatif, tetapi *green sukuk* masih dinilai gagal mengatasi masalah greenwashing, di mana proyek yang tidak sepenuhnya hijau dapat mendapat klaim sebagai proyek ramah lingkungan.

Di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan tiga seri obligasi hijau dengan struktur *green sukuk*. Pengembangan *green sukuk* telah didorong sejak 2018 sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk pembangunan berkelanjutan (SDGs) (Fitrah & Soemitra, 2022). Berdasarkan Studi Mengenai *Green sukuk* Ritel di Indonesia yang diterbitkan oleh DJPPR, penerbitan *green sukuk* memperoleh respon positif dari pasar yang ditandai dengan meningkatnya permintaan (oversubscribe) lebih dari dua kali lipat. Dana yang terkumpul dari penerbitan sukuk ini dikhususkan untuk pembiayaan proyek-proyek yang terkait dengan keberlanjutan, seperti pengelolaan energi, transportasi berkelanjutan, pertanian ramah lingkungan, energi terbarukan, dan ketahanan terhadap perubahan iklim di daerah rentan bencana (Alam et al., 2023). Seluruh proyek akan diseleksi dan dievaluasi menggunakan Climate Budget Tagging, yang terintegrasi dalam sistem perencanaan dan anggaran negara. Semua proyek yang didanai *green sukuk*, harus memenuhi standar dampak lingkungan yang ditetapkan dan divalidasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar sejalan dengan Nationaly Determined Contribution Indonesia.

Meskipun *green sukuk* memiliki potensi besar di Indonesia, Putra et al. (2023) menyoroti beberapa tantangan yang harus diatasi supaya instrumen keuangan ini dapat berkembang lebih lanjut. Terbatasnya sumber daya manusia yang memahami dan memiliki keterampilan di bidang *Green sukuk*, penilaian dan sertifikasi proyek yang akuntabel, kurangnya sosialisasi mengenai *green sukuk*, dan tingkat risiko yang tinggi akibat penggunaan teknologi baru yang belum teruji. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan, dan pelaku industri sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan *Green sukuk* di Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis berbagai penelitian tentang green bond dan green sukuk di berbagai negara menunjukkan bahwa kedua instrumen ini memiliki potensi besar dalam pendanaan proyek berkelanjutan, meski masih menghadapi beragam tantangan dalam implementasinya. Pangsa pasar yang masih terbatas, terutama di kawasan Asia yang hanya mencapai 1.45% dari total penerbitan global, menunjukkan masih besarnya ruang pengembangan instrumen ini. Dominasi lembaga keuangan sebagai penerbit utama serta alokasi dana yang terfokus pada sektor-sektor tertentu seperti bangunan hijau dan energi mencerminkan perlunya diversifikasi penerbit dan penggunaan dana. Meskipun terdapat tambahan biaya untuk sertifikasi dan pelaporan, green bond terbukti memberikan keuntungan finansial bagi penerbit dengan penghematan bunga tahunan mencapai 0.18%. Sementara itu, green sukuk yang menjadi inovasi dalam keuangan syariah telah menunjukkan perkembangan positif, terutama di Malaysia dan Indonesia, tetapi masih menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman pasar dan risiko greenwashing. Sebaiknya, pemerintah dan lembaga keuangan menyediakan pedoman yang lebih jelas dan terstandarisasi untuk meminimalkan kerumitan administrasi dan pelaporan, memberikan insentif fiskal untuk menekan biaya penerbitan dan sertifikasi, serta meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada pasar melalui kolaborasi sektor publik dan swasta. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemahaman dan pengelolaan instrumen keuangan hijau juga menjadi penting untuk mendukung perkembangan green bond dan green sukuk

agar dapat berkontribusi lebih jauh dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di berbagai negara.

Penelitian ini hanya mengandalkan data sekunder dari artikel yang terbatas antara rentang waktu 2019-2024 sehingga hasil yang diperoleh mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan seluruh dinamika pasar green bond dan green sukuk. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data primer seperti melalui wawancara dengan para pembangun kepentingan. Penelitian masa depan juga perlu memperluas cakupan sampel dengan memasukkan lebih banyak artikel dan sumber data dari berbagai negara untuk mendapatkan gambaran yang lebih representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A., Ratnasari, R. T., Jannah, I. L., & El Ashfahany, A. (2023). Development and Evaluation of Islamic Green Financing: A Systematic Review of Green Sukuk. *Environmental Economics*, 14(1), 61–72.
- Alfirman, L., Jenderal, D., Pembiayaan, P., Risiko, D., Keuangan, K., Dwi, P., Hadiningdyah, I., Syariah, P., Jenderal, D., Riana, N., Sadono, D., Septianto, R., Hardiana, M. D., Nathalia, D., Sukmajaya, M., Azarine, T., Haroen, R., Arundina, T., Pertiwi, R. H., ... Lt, S. (2020). *Studi Mengenai Green Sukuk Ritel di Indonesia*. www.djppr.kemenkeu.go.id
- Aly, A. (2024). *Corporate Green Bond Market in Egypt: Barriers to Market Development*. American University in Cairo .
- Aruga, K., & Bolt, T. (2023). Identifying Factors Affecting the Preference for Green Bonds: A Japanese Case Study. *Journal of Climate Finance*, 5, 100021.
- Azhgaliyeva, D., & Kapsalyamova, Z. (2021). *Policy Support in Promoting Green Bonds in Asia*. ADBI Working Paper.
- Budiarso, A. (2019). *Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim*. IPB Press.
- Cho, Y., Kim, S., You, J., Moon, H., & Sung, H. (2021). Application of ESG Measures for Gender Diversity and Equality at the Organizational Level in a Korean Context. *European Journal of Training and Development*, 45(4/5), 346–365.
- Fitrah, R., & Soemitra, A. (2022). Green Sukuk for Sustainable Development Goals in Indonesia: A Literature Study. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 231–240.
- Galbreath, J. (2013). ESG in Focus: The Australian Evidence. *Journal of Business Ethics*, 118, 529–541.
- Gianfrate, G., & Peri, M. (2019). The Green Advantage: Exploring the Convenience of Issuing Green Bonds. *Journal of Cleaner Production*, 219, 127–135.
- Hammer, J., & Pivo, G. (2017). The Triple Bottom Line and Sustainable Economic Development Theory and Practice. *Economic Development Quarterly*, 31(1), 25–36.
- Kaminker, C. (2015). Green Bonds. Mobilising the Debt Capital Markets for a Low-Carbon Transition. *OECD Policy Perspectives*.
- Kaminker, C., & Youngman, R. (2015). Sustainable Energy Infrastructure, Finance, and Institutional Investors. *Organisation for Economic Cooperation and Development. The OECD Observer*, 304, 20.
- Kewal, S. S., & Putranto, Y. A. (2019). Socially Responsible Investing (SRI) dan Kinerja Saham. *Jurnal Nominal*, 8(2), 194–208.
- Liu, F. H. M., & Lai, K. P. Y. (2021). Ecologies of Green Finance: Green Sukuk and Development of Green Islamic Finance in Malaysia. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 53(8), 1896–1914.
- Melau, M., & Hoffmann, V. N. (2020). *Green Bonds: Effective Vehicles or False Promises?* Copenhagen Business School.
- Munn, Z., Peters, M. D. J., Stern, C., Tufanaru, C., McArthur, A., & Aromataris, E. (2018). Systematic Review or Scoping Review? Guidance for Authors When Choosing Between a Systematic or Scoping Review Approach. *BMC Medical Research Methodology*, 18, 1–7.

- Ngwenya, N., & Simatele, M. D. (2020). The Emergence of Green Bonds as an Integral Component of Climate Finance in South Africa. *South African Journal of Science*, 116(1–2), 1–3.
- Nurhamsyah, D., Trisyani, Y., & Nuraeni, A. (2018). Quality of Life of Patients After Acute Myocardial Infarction: A Scoping Review. *Journal of Nursing Care*, 1(3), 180–191.
- Nurhidayat, E., Junaid, A., & Kamase, J. (2020). Penerapan Akuntansi Lingkungan Berdasarkan *Triple Bottom Line* pada RSUD HM Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 2(2), 38–80.
- Odey, G. O., Alawad, A. G. A., Atieno, O. S., Carew-Bayoh, E. O., Fatuma, E., Ogunkola, I. O., & Lucero-Prisno III, D. E. (2021). COVID-19 Pandemic: Impacts on the Achievements of Sustainable Development Goals in Africa. *Pan African Medical Journal*, 38(1).
- Pandin, M. Y. R., Prisilia, S., Pribadi, A. F., & Larissa, C. (2023). Analisis Penerapan *Triple Bottom Line* sebagai Kunci Keberlanjutan bagi Perusahaan *Food and Beverage*. *Journal of Social and Economics Research*, 5(2), 579–586.
- Pham, M. T., Rajić, A., Greig, J. D., Sargeant, J. M., Papadopoulos, A., & McEwen, S. A. (2014). A Scoping Review of Scoping Reviews: Advancing the Approach and Enhancing the Consistency. *Research synthesis methods*, 5(4), 371–385.
- Prakash, N., & Sethi, M. (2021). Green Bonds Driving Sustainable Transition in Asian Economies: The Case of India. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(1), 723–732.
- Prakash, N., & Sethi, M. (2022). A Review of Innovative Bond Instruments for Sustainable Development in Asia. *International Journal of Innovation Science*, 14(3/4), 630–647.
- Putra, A. T., Hiljannah, Z. Z., Desfiansyah, F., & Sarjono, O. R. (2023). The Role of Green Sukuk for Sustainable National Development. *Jurnal Ekonomi Syariah Vol*, 8(2).
- Richardson, A. J. (2009). Regulatory Networks for Accounting and Auditing Standards: A Social Network Analysis of Canadian and International Standard-Setting. *Accounting, Organizations and Society*, 34(5), 571–588.
- Tahiri Jouti, A. (2019). An Integrated Approach for Building Sustainable Islamic Social Finance Ecosystems. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 246–266.
- Wahab, M. Z., & Mohamed Naim, A. (2020). Sustainable and Responsible Investment: Concept and the Commonalities with Islamic Financial Institutions. *Etikonomi*, 19(1), 141–154.
- Zahid, R. M. A., Khan, M. K., Anwar, W., & Maqsood, U. S. (2022). The Role of Audit Quality in the ESG-Corporate Financial Performance Nexus: Empirical Evidence from Western European Companies. *Borsa Istanbul Review*, 22, S200–S212.
- Žak, A. (2015). Triple Bottom Line Concept in Theory and Practice. *Social Responsibility of Organizations Directions of Changes*, 387(1), 251–264.